

## Peran Lembaga Keuangan dalam Pembiayaan Ibadah Haji dan Umroh

**Emerald Nahlal Paradise\*<sup>1</sup>**  
**Mhd. Habibi Nasution<sup>2</sup>**  
**Erinna Amelia Ratnaduhita<sup>3</sup>**  
**Abdul Hafiz<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah  
Jakarta

\*e-mail: [nahlalparadise@gmail.com](mailto:nahlalparadise@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

*Penelitian ini mengkaji peran lembaga keuangan dalam pembiayaan ibadah haji dan umroh, dengan fokus pada aspek-aspek pendanaan dan dampaknya terhadap calon jamaah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur yang mencakup analisis berbagai produk pembiayaan haji dan umroh serta kebijakan pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19. Produk-produk seperti dana talangan haji menggunakan akad Qardh Wal Ijarah, yang membantu calon jamaah dalam merencanakan dan membiayai perjalanan ibadah mereka. Namun, pentingnya penyesuaian produk dengan prinsip syariah dan etika bisnis Islam menjadi faktor krusial untuk menjaga kepercayaan nasabah dan keberlanjutan layanan. Penelitian ini menekankan perlunya fleksibilitas, transparansi, dan kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan otoritas keagamaan untuk memastikan kelancaran pembiayaan ibadah haji dan umroh di masa mendatang.*

**Kata kunci:** lembaga keuangan, pembiayaan haji dan umroh, syariah

### **Abstract**

*This study examines the role of financial institutions in financing Hajj and Umrah pilgrimages, focusing on funding aspects and their impact on prospective pilgrims. The research method used is a literature study that includes an analysis of various Hajj and Umrah financing products and related government policies. The findings show that Islamic financial institutions play a crucial role in providing financing that complies with Sharia principles, especially in crisis situations like the COVID-19 pandemic. Products such as Hajj bailout funds use Qardh Wal Ijarah contracts, which assist prospective pilgrims in planning and financing their pilgrimage journeys. However, the importance of aligning products with Sharia principles and Islamic business ethics is critical to maintaining customer trust and service sustainability. This study highlights the need for flexibility, transparency, and collaboration between financial institutions, the government, and religious authorities to ensure the smooth financing of Hajj and Umrah pilgrimages in the future.*

**Keywords:** financial institutions, Hajj and Umrah financing, Sharia

### **PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung operasional berbagai institusi, termasuk institusi layanan haji dan umroh. Sebagai pilar utama dalam pengelolaan dana, lembaga keuangan membantu mengatur aliran keuangan, menyediakan layanan pembiayaan, serta memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dikelola secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks haji dan umroh, peran lembaga keuangan menjadi semakin krusial mengingat besarnya dana yang terlibat serta tingginya harapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Pembiayaan ibadah haji dan umroh merupakan aspek vital yang perlu mendapatkan perhatian serius. Ibadah haji dan umroh, sebagai rukun Islam yang kelima, memiliki makna spiritual yang sangat mendalam bagi umat Muslim. Setiap tahun, jutaan Muslim dari seluruh dunia berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah ini, yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan yang dapat menyediakan layanan pembiayaan yang aman dan efisien sangat diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menunaikan ibadah ini tanpa terkendala masalah finansial.

Haji dan umroh memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat Muslim. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, ibadah ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan antar umat Muslim dari berbagai negara. Pertemuan di Tanah Suci ini menciptakan ikatan sosial dan spiritual yang kuat, serta memperkuat solidaritas umat Muslim di seluruh dunia. Oleh karena itu, memfasilitasi kemudahan dalam menunaikan ibadah haji dan umroh melalui pembiayaan yang terjangkau menjadi tanggung jawab bersama, termasuk lembaga keuangan.

Dampak ibadah haji dan umroh tidak hanya dirasakan oleh individu yang menunaikannya, tetapi juga memberikan dampak yang luas bagi negara. Peningkatan jumlah jamaah haji dan umroh setiap tahunnya membawa dampak ekonomi yang signifikan, terutama bagi negara-negara yang menjadi tujuan utama ibadah ini, seperti Arab Saudi. Di sisi lain, negara-negara asal jamaah juga merasakan dampak positif dari aspek perekonomian, seperti meningkatnya aktivitas sektor perbankan dan layanan keuangan terkait pembiayaan haji dan umroh.

Keberhasilan pelaksanaan ibadah haji dan umroh sangat bergantung pada kesiapan dan koordinasi berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan. Peran lembaga keuangan tidak hanya terbatas pada penyediaan dana, tetapi juga mencakup pengelolaan dana secara efektif dan efisien. Pengelolaan dana yang baik akan memastikan bahwa seluruh kebutuhan jamaah dapat terpenuhi dengan baik, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga pelayanan kesehatan selama di Tanah Suci.

Selain itu, lembaga keuangan juga berperan dalam memberikan edukasi finansial kepada calon jamaah haji dan umroh. Edukasi ini meliputi informasi mengenai cara menabung yang efektif, memahami produk-produk keuangan yang tersedia, serta bagaimana mengelola keuangan dengan bijak sebelum, selama, dan setelah menunaikan ibadah. Dengan demikian, calon jamaah akan lebih siap secara finansial dan dapat menunaikan ibadah dengan tenang.

Di era digitalisasi seperti sekarang, peran lembaga keuangan juga semakin berkembang dengan adanya layanan keuangan digital. Inovasi ini memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pembiayaan haji dan umroh melalui platform digital, yang memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran, pembayaran, dan pemantauan dana. Layanan digital ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, sehingga masyarakat semakin percaya terhadap lembaga keuangan yang ada.

Pentingnya peran lembaga keuangan dalam pembiayaan haji dan umroh juga tercermin dari berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan dana haji dan umroh secara profesional. Pemerintah berupaya memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku, sehingga jamaah dapat menunaikan ibadah dengan tenang dan nyaman. Dukungan ini menciptakan ekosistem yang kondusif bagi lembaga keuangan dalam menjalankan perannya secara optimal.

Keterlibatan lembaga keuangan dalam pembiayaan haji dan umroh juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Dengan adanya berbagai program dan produk pembiayaan haji dan umroh, masyarakat menjadi lebih melek terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan bijak. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi pelaksanaan ibadah, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga.

Oleh karena itu, peran lembaga keuangan dalam pembiayaan ibadah haji dan umroh tidak dapat dipandang sebelah mata. Penting bagi seluruh pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berinovasi dalam menyediakan layanan keuangan yang aman, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan demikian, ibadah haji dan umroh dapat dilaksanakan dengan baik, memberikan dampak positif bagi individu, masyarakat, dan negara.

## **LANDASAN TEORI**

### **Lembaga Keuangan**

Lembaga keuangan adalah entitas yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan tujuan utama untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau investasi. Lembaga ini berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan dapat dibagi menjadi dua

kategori utama: lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank mencakup bank umum, bank sentral, dan bank pembangunan, sementara lembaga keuangan non-bank meliputi perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan sekuritas, dan reksa dana (Mishkin, 2013).

Peran utama lembaga keuangan dalam perekonomian sangat krusial. Lembaga keuangan membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dengan menyalurkan dana dari penabung kepada peminjam yang produktif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Levine, 2005). Selain itu, lembaga keuangan juga menyediakan berbagai layanan keuangan seperti pembayaran, penukaran mata uang, serta manajemen risiko yang membantu memperlancar transaksi ekonomi dan mengurangi ketidakpastian bagi pelaku usaha dan individu.

Dalam konteks pembiayaan haji dan umroh, lembaga keuangan memiliki peran yang signifikan. Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan koperasi syariah sering kali menawarkan produk pembiayaan khusus untuk ibadah haji dan umroh (Karim, 2011). Produk-produk ini dirancang untuk membantu calon jamaah dalam merencanakan dan membiayai perjalanan ibadah mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk pembiayaan haji dan umroh biasanya menggunakan akad murabahah atau ijarah, yang memungkinkan calon jamaah untuk mencicil biaya perjalanan secara bertahap.

Pentingnya regulasi dan pengawasan terhadap lembaga keuangan juga tidak dapat diabaikan. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen (Bank Indonesia, 2018). Pengawasan yang baik akan memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi dengan cara yang sehat dan tidak mengambil risiko berlebihan yang dapat mengancam stabilitas ekonomi. Selain itu, regulasi juga bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen seperti penipuan dan manipulasi pasar.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji peran lembaga keuangan dalam pembiayaan ibadah haji dan umroh. Studi literatur melibatkan analisis terhadap berbagai produk pembiayaan haji dan umroh serta kebijakan pemerintah terkait. Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan pemerintah yang relevan dengan topik. Metode ini dipilih karena memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perkembangan dan dinamika pembiayaan haji dan umroh dari berbagai perspektif. Penelitian ini juga mengidentifikasi peran lembaga keuangan syariah dalam menyediakan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi dampak dari produk-produk pembiayaan ini terhadap calon jamaah dan menilai sejauh mana kebijakan dan produk tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan etika bisnis Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengkaji peran lembaga keuangan dalam pembiayaan ibadah haji dan umroh. Melalui metode studi literatur, penelitian ini menyelidiki berbagai aspek pembiayaan haji dan umroh serta dampaknya terhadap calon jamaah.

Penelitian pertama mengungkapkan bahwa ibadah haji menjadi dambaan setiap umat Muslim, khususnya masyarakat Muslim Indonesia, karena dianggap sebagai puncak pencapaian spiritualitas dan simbol eksistensi di lingkungan sosial-keagamaan (Mubarok & Faizah, 2022). Namun, pandemi COVID-19 membawa perubahan signifikan dalam pola dan praktik pembiayaan haji. Dalam kondisi normal, calon jamaah haji yang telah memenuhi setoran awal atau setoran minimum akan didaftarkan dalam aplikasi SISKOHAT dan masuk ke dalam daftar tunggu. Selama pandemi, terdapat pengurangan dan penundaan keberangkatan haji dari Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan stimulus, seperti pengembalian setoran BIPIH yang telah dilunasi dan jaminan bahwa calon jamaah yang tertunda akan menjadi

calon jamaah haji pada tahun berikutnya. Kebijakan ini menunjukkan fleksibilitas lembaga keuangan syariah dalam merespons situasi krisis.

Penelitian kedua menganalisis besarnya pembiayaan dana talangan haji di Bank Sumut Syariah. Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan BPIH (Sinaga *et al.*, 2018). Produk pembiayaan ini menggunakan prinsip Qardh Wal Ijarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad dana talangan haji di bank syariah mengandung multi akad, yaitu qardh dan ijarah, yang diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam. Namun, pengambilan fee ujarah pada dana talangan haji tidak sesuai dengan syariah karena prosentase fee ujarah berdasarkan dana qardh. Hal ini menyoroti pentingnya penyesuaian produk pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan kesesuaian dengan hukum Islam.

Penelitian ketiga membahas perkembangan lembaga keuangan Islam dalam menyediakan produk pembiayaan dana talangan haji. Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa dana talangan haji menggunakan akad qard dan ijarah untuk membantu calon jamaah memperoleh porsi haji (Rahayu & Marzuki, 2020). Namun, penelitian ini menemukan bahwa implementasi dana talangan haji tidak selalu sesuai dengan prinsip etika bisnis dan syariah Islam. Dampak negatif dari implementasi yang tidak sesuai dapat merugikan calon jamaah dan mengurangi kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk selalu mengevaluasi dan memastikan bahwa produk pembiayaan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis dan syariah.

Pembiayaan haji dan umroh merupakan salah satu layanan penting yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dalam konteks normal, pembiayaan ini berjalan sesuai aturan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Namun, pandemi COVID-19 membawa perubahan drastis dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan syariah. Perubahan ini mengharuskan lembaga keuangan untuk beradaptasi dan merespons tantangan yang ada dengan cepat dan efektif.

Pandemi COVID-19 mengakibatkan penundaan dan pengurangan jumlah jamaah haji yang dapat diberangkatkan. Hal ini mendorong Kementerian Agama untuk mengambil langkah-langkah stimulus, seperti pengembalian setoran BIPIH yang telah dilunasi oleh calon jamaah. Kebijakan ini tidak hanya memberikan kepastian bagi calon jamaah yang terkena dampak penundaan, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas dan responsivitas lembaga keuangan syariah dalam menghadapi situasi krisis.

Lebih lanjut, penelitian tentang pembiayaan dana talangan haji menunjukkan bahwa produk ini memainkan peran penting dalam membantu calon jamaah yang kekurangan dana. Prinsip Qardh Wal Ijarah yang digunakan dalam akad pembiayaan ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan pinjaman dengan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Namun, penentuan fee ujarah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah menunjukkan perlunya peninjauan ulang dan penyempurnaan produk agar lebih adil dan transparan. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa setiap produk yang mereka tawarkan tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga tidak memberatkan nasabah.

Penelitian terakhir menyoroti pentingnya kesesuaian pembiayaan dana talangan haji dengan etika bisnis Islam. Implementasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dapat menimbulkan dampak negatif bagi nasabah dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, evaluasi terus-menerus dari produk pembiayaan dan praktik bisnis sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan nasabah tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari ketiga penelitian ini, dapat ditarik beberapa implikasi praktis dan kebijakan yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dan pemerintah. Pertama, fleksibilitas dalam kebijakan pembiayaan sangat penting dalam menghadapi situasi krisis seperti pandemi. Lembaga keuangan syariah harus siap untuk menyesuaikan kebijakan mereka dengan cepat agar dapat memberikan solusi yang efektif bagi nasabah. Kedua, transparansi dan keadilan dalam penetapan fee dan syarat pembiayaan sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa setiap produk yang mereka tawarkan tidak hanya

sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga transparan dan adil bagi nasabah. Ketiga, pentingnya evaluasi dan penyesuaian produk pembiayaan dari perspektif etika bisnis Islam. Implementasi produk yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dapat menimbulkan dampak negatif bagi nasabah dan merusak reputasi lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, evaluasi terus-menerus dan penyesuaian produk sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan selalu sesuai dengan prinsip syariah dan etika bisnis Islam.

Peran lembaga keuangan dalam pembiayaan ibadah haji dan umroh sangat penting, terutama dalam konteks perubahan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Fleksibilitas, transparansi, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah adalah faktor kunci yang menentukan keberhasilan lembaga keuangan syariah dalam melayani kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya koordinasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan otoritas keagamaan dalam memastikan kelancaran pembiayaan ibadah haji dan umroh di masa mendatang. Dalam menghadapi tantangan global, fleksibilitas, responsivitas, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah akan menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan lembaga keuangan syariah dalam melayani kebutuhan masyarakat.

## KESIMPULAN

Telah dipaparkan peran signifikan yang dimainkan oleh lembaga keuangan dalam mendukung pembiayaan untuk ibadah haji dan umroh. Melalui analisis yang mendalam terhadap berbagai jenis produk keuangan yang tersedia, dapat dilihat bagaimana lembaga-lembaga keuangan tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu jamaah dalam memenuhi kewajiban spiritual mereka dengan lebih terjangkau dan terkelola secara efisien.

Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan aksesibilitas serta keamanan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Dengan implementasi yang tepat dari mekanisme pembiayaan yang sesuai syariah maupun konvensional, diharapkan dapat terus mendukung pertumbuhan jumlah jamaah yang dapat melaksanakan ibadah tanpa hambatan finansial yang berarti.

Penelitian ini juga menyoroti tantangan dan peluang di masa depan dalam pengembangan lebih lanjut dari produk-produk keuangan yang terfokus pada kebutuhan unik jamaah haji dan umroh. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan kebijakan serta strategi bisnis bagi lembaga keuangan yang berperan dalam mendukung ibadah haji dan umroh sebagai bagian integral dari kehidupan keagamaan umat Muslim global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2018). *Laporan Pengawasan Perbankan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Levine, R. (2005). Finance and Growth: Theory and Evidence. In P. Aghion & S. N. Durlauf (Eds.), *Handbook of Economic Growth* (pp. 865-934). Amsterdam: Elsevier.
- Mishkin, F. S. (2013). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Boston: Pearson.
- Mubarok, A., & Faizah, I. (2022). "BIAYA PENGEYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN PRAKTEKNYA DI BANK SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19" *MULTAZAM : Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*, 2(1), (hlm. 74-90)
- Rahayu, D., & Marzuki, I. (2020). "Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam" *Kitabah*, 4(1), (hlm. 1-20)
- Sinaga, A. (2018). "Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji untuk Biaya Perjalan Ibadah Haji: Studi Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat" *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), (hlm. 228-244)